

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

TAHUNAN UNAUDITED T.A. 2023



JL. AWANG LONG NO. 2 KEL. BONTANG BARU, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

TELP: (0548) 26066 | FAX: (0548) 27706

HOME PAGE: [HTTP://BONTANGKOTA.BPS.GO.ID](http://bontangkota.bps.go.id) | EMAIL: BPS6474@BPS.GO.ID

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 1 Februari 2024
Kepala BPS Kota Bontang,



Widiyantono SST., M.Stat.
NIP.197901092000121001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Indeks Singkatan	vii
I. Ringkasan	1
II Laporan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	4
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3 Basis Akuntansi	11
A.4 Dasar Pengukuran	11
A.5 Kebijakan Akuntansi	11
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
B.2 Belanja Negara	24
B.3 Belanja Pegawai	29
B.4 Belanja Barang	30
B.5 Belanja Modal	31
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	32
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	34
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	34
C.2 Persediaan	34
C.3 Tanah	40
C.4 Peralatan Dan Mesin	41
C.5 Gedung Dan Bangunan	42
C.6 Aset Tetap Lainnya	43
C.7 Akumulasi Penyusutan	44
C.8 Aset Tak Berwujud	44
C.9 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	45
C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga	46
C.11 Ekuitas	47
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	48

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	48
D.2 Beban Pegawai	49
D.3 Beban Persediaan	51
D.4 Beban Barang Dan Jasa	51
D.5 Beban Pemeliharaan	55
D.6 Beban Perjalanan Dinas	56
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	57
D.8 Kegiatan Non Operasional	58
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
E.1 Ekuitas Awal	60
E.2 Surplus/defisit-lo	60
E.4 Transaksi Antar Entitas	60
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	61
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	62
E.5 Ekuitas Akhir	64
F. Pengungkapan Lainnya	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	13
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4	Rincian Anggaran	17
Tabel 4A	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program	18
Tabel 4B	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana	19
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	24
Tabel 7A	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program	25
Tabel 7B	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	26
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	28
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	29
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	30
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	32
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
Tabel 13	Rincian Belanja Dibayar di Muka	34
Tabel 14	Rincian Persediaan	35
Tabel 15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 16	Rincian Aset Tak berwujud	45
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	46
Tabel 18	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	46
Tabel 19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
Tabel 20	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai	49
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	50
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan	51
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa	52
Tabel 25	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	54
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan	55
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	56
Tabel 28	Rincian Beban Perjalanan Dinas	56
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	57
Tabel 30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
Tabel 31	Rincian Kegiatan Non Operasional	58
Tabel 32	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	60
Tabel 33	Rincian Transfer Masuk	62

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 1 Februari 2024

Kepala BPS Kota Bontang,



Widiyantono, SST., M.Stat.

NIP. 197901092000121001

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.951.640 atau mencapai 101,54 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.922.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.181.068.269 atau mencapai 98,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.248.992.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.072.811.976 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp68.836.027 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.003.975.949 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.257.612 dan Rp4.972.554.364.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.951.640, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.920.661.704 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.918.710.064. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp29.812.848 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.948.522.912.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.670.320.299 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.948.522.912 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.250.756.977 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp4.972.554.364.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Bontang
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% terhadap Anggaran	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.922.000	1.951.640	101,54	17.041.644
JUMLAH PENDAPATAN		1.922.000	1.951.640	101,54	17.041.644
Belanja Negara	B.2	6.248.992.000	6.181.068.269	98,91	7.267.458.416
Belanja Pegawai	B.3	2.737.074.000	2.720.562.954	99,40	3.056.493.129
Belanja Barang	B.4	2.858.218.000	2.807.525.315	98,23	4.210.965.287
Belanja Modal	B.5	653.700.000	652.980.000	99,89	0
JUMLAH BELANJA		6.248.992.000	6.181.068.269	98,91	7.267.458.416

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. NERACA

BPS Kota Bontang NERACA Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	3.522.137	20.375.898
Persediaan	C.2	65.313.890	103.117.440
Jumlah Aset Lancar		68.836.027	123.493.338
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.504.778.000	1.504.778.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	2.337.354.471	1.648.571.967
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.874.089.197	2.874.089.197
Aset Tetap Lainnya	C.6	102.281.121	102.281.121
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.814.526.840)	(1.481.975.254)
Jumlah Aset Tetap		5.003.975.949	4.647.745.031
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	25.700.000
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.9	(25.700.000)	(22.487.500)
Jumlah Aset Lainnya		0	3.212.500
JUMLAH ASET		5.072.811.976	4.774.450.869
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	100.257.612	104.130.570

JUMLAH KEWAJIBAN		100.257.612	104.130.570
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	4.972.554.364	4.670.320.299
JUMLAH EKUITAS		4.972.554.364	4.670.320.299
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.072.811.976	4.774.450.869

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Bontang LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.951.640	1.921.644
JUMLAH PENDAPATAN		1.951.640	1.921.644
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.716.789.996	3.054.426.661
Beban Persediaan	D.3	198.531.420	269.001.313
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.798.688.395	2.930.548.662
Beban Pemeliharaan	D.5	125.190.678	116.855.963
Beban Perjalanan Dinas	D.6	781.499.633	989.255.624
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	299.961.582	240.987.972
JUMLAH BEBAN		5.920.661.704	7.601.076.195
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.918.710.064)	(7.599.154.551)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	17.534.250
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		29.812.848	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(29.812.848)	15.495.240
SURPLUS/DEFISIT		(5.948.522.912)	(7.583.659.311)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Bontang LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas awal	E.1	4.670.320.299	4.875.904.258
Surplus/defisit-LO	E.2	(5.948.522.912)	(7.583.659.311)
Transaksi Antar Entitas	E.4	6.250.756.977	7.378.075.352
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	6.179.116.629	7.250.416.772
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	71.640.348	127.658.580
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		302.234.065	(205.583.959)
Ekuitas Akhir	E.5	4.972.554.364	4.670.320.299

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Bontang**

Rencana Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS :

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

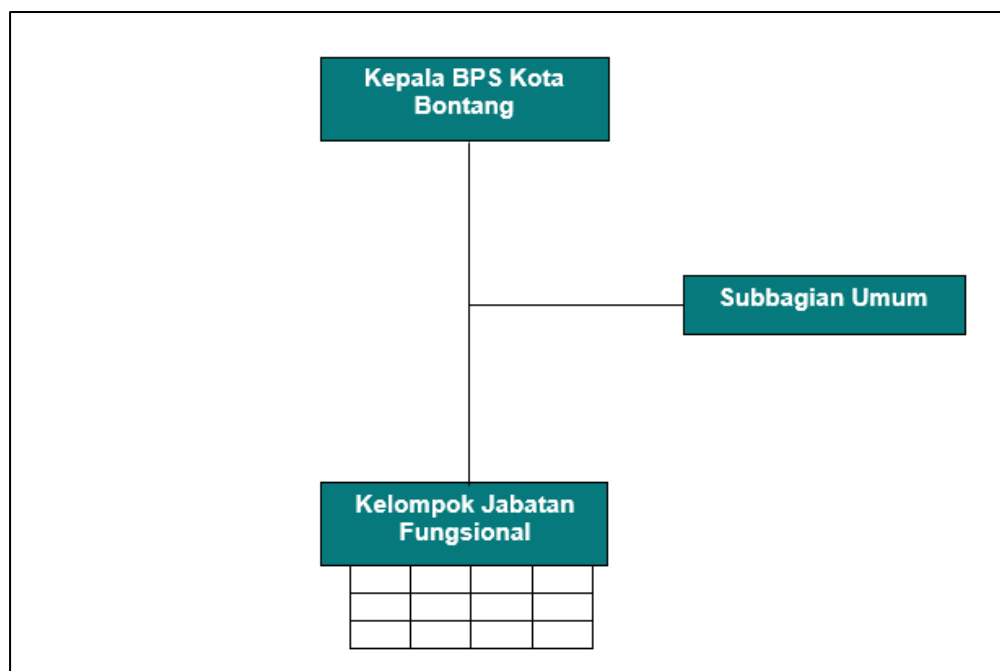
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS.
Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023



Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPS Kota Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan penjualan aset.
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (first in first out) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2021.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 semula Rp6.840.191.000 menjadi Rp6.248.992.000, terdapat penurunan sebesar Rp591.199.000. Penurunan anggaran belanja terjadi pada kelompok Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Anggaran kelompok Belanja Pegawai terdapat penurunan sebesar Rp435.152.000. Penurunan ini diperoleh dari anggaran semula sebesar Rp3.172.226.000 berubah menjadi Rp2.737.074.000. Sementara, pada kelompok Belanja Barang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp467.747.000, dari anggaran awal sejumlah Rp3.325.965.000 menjadi Rp2.858.218.000. Berbeda dengan kelompok Belanja Pegawai dan Belanja Barang, kelompok Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp311.700.000, dari anggaran awal sejumlah Rp342.000.000 berubah menjadi Rp653.700.000.

Estimasi penerimaan pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp1.922.000. Nilai estimasi penerimaan pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.922.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.922.000	1.922.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.172.226.000	2.737.074.000
BELANJA BARANG	3.325.965.000	2.858.218.000
BELANJA MODAL	342.000.000	653.700.000
Jumlah Belanja	6.840.191.000	6.248.992.000

Anggaran belanja selama Tahun Anggaran 2023 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Anggaran belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini terdapat pada pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4A
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.660.640.000	2.493.773.000
Program Dukungan Manajemen	4.179.551.000	3.755.219.000
Jumlah	6.840.191.000	6.248.992.000

Anggaran belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp166.867.000 dari anggaran semula sebesar Rp2.660.640.000 menjadi sebesar Rp2.493.773.000. Sedangkan anggaran belanja kelompok program Dukungan Manajemen mengalami penurunan sebesar Rp424.332.000 dari anggaran semula sebesar Rp4.179.551.000 menjadi sebesar Rp3.755.219.000. Atas perubahan anggaran belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen, secara keseluruhan selama Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp591.199.000.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, anggaran belanja selama Tahun Anggaran 2023 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana yang diterima terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Sumber dana untuk anggaran belanja di Badan Pusat Statistik Kota Bontang berasal dari Rupiah Murni (RM). Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran belanja dari kelompok sumber dana Rupiah Murni mengalami penurunan sebesar Rp591.199.000 dari anggaran semula sebesar Rp6.840.191.000 menjadi Rp6.248.992.000, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4B
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Rupiah Murni (RM)	6.840.191.000	6.248.992.000
PNBP	0	0
Hibah	0	0
Jumlah	6.840.191.000	6.248.992.000

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8217-0272-9060-7738 dengan total nilai pagu anggaran Rp 6.840.191.000 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Per 31 Desember 2023, BPS Kota Bontang telah melakukan 12 kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka *Automatic Adjustment* sesuai surat Pengguna Anggaran no : B-507/01000/PR.440/12/2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 28 Desember 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 301-0012-8030-3808. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp6.840.191.000 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka Penyesuaian Hal III DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9301-0012-8030-3808. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp6.840.191.000 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-235/02100/PR.400/02/2023 dan perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0429-0080-4639-4170. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah

- menjadi Rp7.155.244.000 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka ralat rencana penarikan dana Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK serta perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 13 April 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0429-0080-4639-4170 Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp7.155.244.000 (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka Revisi DIPA antar SATKER sesuai surat kepala BPS Provinsi Kaltim No. B-33/64511/PR.440/05/2023 dan perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1201-0388-7323-3820 Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp7.172.602.000 (tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah).
 - f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-981/02100/PR.440/06/2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 6251-6062-0200-1223. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp6.824.698.000 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-848/02000/PR.440/07/2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 5607-9276-9407-4994. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp6.617.854.000 (enam miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka pemenuhan anggaran ST2023, belanja pegawai, anggaran pembinaan Desa Cantik, dan anggaran kegiatan Sakernas di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur No. B-069/64511/PR.440/09/2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 20 September 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 4632-7924-0500-8603. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah

- menjadi Rp6.735.914.000 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran ST2023, belanja pegawai, penambahan belanja (53), dan optimalisasi anggaran non operasional belanja barang (52) sesuai Surat Sekretaris Utama BPS RI No. B-1740/02100/PR.440/09/2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9372-2660-0995-2745. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp6.673.246.000 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai *Automatic Adjustment* TA 2023 sesuai Surat Sekretaris Utama BPS RI no B-1179/02000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2056-0481-0332-0019. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp6.248.992.000 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - k. Revisi ke-11 dilakukan dalam rangka revisi pemenuhan belanja gaji pegawai 2023. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 30 November 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2056-0481-0332-0019. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp6.248.992.000 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - l. Revisi ke-12 dilakukan melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka update data akhir revisi POK. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2056-0481-0332-0019. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp6.248.992.000 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Rincian setiap Revisi DIPA dijelaskan pada Penjelasan Lainnya.

Adapun pengurangan anggaran sampai dengan periode 31 Desember 2023 ini berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran dan sasaran capaian kinerja yang ditargetkan sampai dengan periode Desember 2023 karena satker perlu meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Realisasi *PNBP* **B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**
Rp1.951.640

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.951.640 atau mencapai 101,54 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.922.000. Rincian Pendapatan BPS Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.921.644	99,98
Pendapatan Lain-Lain	0	29.996	0,00
Jumlah	1.922.000	1.951.640	0

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terdiri atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2023 dan dirinci sebagaimana berikut:

- a. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Januari 2023 No. 00001A tanggal 1 Januari 2023;
- b. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Februari 2023 No. 00002A tanggal 9 Januari 2023;
- c. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Maret 2023 No. 00007A tanggal 14 Februari 2023;
- d. Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk April 2023 No. 00018A tanggal 14 Maret 2023;
- e. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Mei 2023 No. 00061A tanggal 14 April 2023;
- f. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juni 2023 No. 00088A tanggal 11 Mei 2023.
- g. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juli 2023 No. 00124A tanggal 12 Juni 2023.

- h. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Agustus 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Agustus 2023 No. 00163A tanggal 14 Juli 2023.
- i. Pendapatan sewa rumah dinas bulan September 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk September 2023 No. 00178A tanggal 7 Agustus 2023.
- j. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Oktober 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Oktober 2023 No. 00229A tanggal 10 September 2023.
- k. Pendapatan sewa rumah dinas bulan November 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk November 2023 No. 00274A tanggal 6 Oktober 2023.
- l. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Desember 2023 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Desember 2023 No. 00307A tanggal 8 November 2023.

Adapun selisih target anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan realisasi sebesar 0,02 persen berasal dari pembulatan.

Sementara, Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp29.996 berasal dari koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai Rp29.996 dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023(Rp)	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.921.644	1.921.644	0,00
Pendapatan Lain-Lain	29.996	15.120.000	(99,80)
Jumlah	1.951.640	17.041.644	(88,55)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 88,55 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2022.

Tidak terdapat perubahan antara realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN per 31 Desember 2023 dengan per 31 Desember 2022. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN senilai Rp1.921.644 berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2023 sebesar Rp1.921.644.

Sedangkan, untuk Pendapatan Lain-Lain terjadi penurunan sebanyak 99,80 persen. Penurunan Pendapatan Lain-Lain ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Per 31 Desember 2023 terdapat koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai Rp29.996 dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.
- b. Per 31 Desember 2022 terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp15.120.000. Pengembalian ini terdiri dari Pengembalian kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 sebesar Rp1.080.000; Pengembalian kekurangan Gaji 13 Tahun 2021 sebesar Rp1.080.000; dan Pengembalian kekurangan Tunjangan Struktural PNS Tahun 2021 sebesar Rp12.960.000.
- c. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

*Realisasi Belanja Negara
Rp6.181.068.269*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.181.068.269 atau 98,91 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.248.992.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	2.737.074.000	2.720.562.954	99,40
BELANJA BARANG	2.858.218.000	2.807.525.315	98,23
BELANJA MODAL	653.700.000	652.980.000	99,89
Jumlah Netto	6.248.992.000	6.181.068.269	98,91

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2023 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp6.248.992.000 dan Rp6.181.068.269. Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 43,80 persen atau senilai Rp2.737.074.000. Komposisi realisasi Belanja Pegawai netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 44,01 persen atau senilai Rp2.720.562.954. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Pegawai adalah 99,40 persen.
2. Komposisi anggaran Belanja Barang dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 45,74 persen atau senilai Rp2.858.218.000. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 45,42 persen atau senilai Rp2.807.525.315. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang adalah 98,23 persen.
3. Komposisi anggaran Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 10,46 persen atau senilai Rp653.700.000. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 10,56 persen atau senilai Rp652.980.000. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal adalah 99,89 persen.

Persentase anggaran belanja barang merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai anggaran menurut jenis belanja dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai dan belanja modal selama Tahun Anggaran 2023.

*Tabel 7A
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.493.773.000	2.443.120.422	97,97
Program Dukungan Manajemen	3.755.219.000	3.737.947.847	99,54
Jumlah Netto	6.248.992.000	6.181.068.269	98,91

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2023 menurut program, masing-masing sebesar Rp6.248.992.000 dan Rp6.181.068.269. Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang terbagi menjadi dua jenis program yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 39,91 persen atau senilai Rp2.493.773.000. Komposisi realisasi Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 39,53 persen atau senilai Rp2.443.120.422. Sedangkan persentase realisasi Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 97,97 persen. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai, operasional perkantoran, dan kegiatan non operasional lainnya.
2. Komposisi anggaran Belanja Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 60,09 persen atau senilai Rp3.755.219.000. Komposisi realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 60,47 persen atau senilai Rp3.737.947.847. Sedangkan persentase realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 99,54 persen. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Tabel 7B
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Rupiah Murni (RM)	6.248.992.000	6.181.068.269	98,91
PNBP	0	0	-
Hibah	0	0	-
Jumlah Netto	6.248.992.000	6.181.068.269	98,91

Apabila dilihat menurut sumber dana, realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni adalah sebesar 98,91 persen. Selama Tahun

Anggaran 2023 di BPS Kota Bontang tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja menggunakan sumber dana PNBPN maupun Hibah. Anggaran dalam kelompok sumber dana Rupiah Murni merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) sebesar Rp3.000.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.993.000;
2. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp30.050.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp30.009.671;
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) sebesar Rp55.207.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp55.038.268;
4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) sebesar Rp54.067.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp54.021.136;
5. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900) sebesar Rp10.110.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp10.106.679;
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902) sebesar Rp14.253.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp14.252.669;
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903) sebesar Rp65.036.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp64.611.456;
8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (2904) sebesar Rp81.810.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp81.774.471;
9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp159.642.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp159.578.444;
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp298.303.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp298.196.092;
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp433.328.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp385.528.789;
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (2908) sebesar Rp46.412.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp46.037.688;
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (2909) sebesar Rp6.001.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp5.998.877;
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) sebesar Rp1.236.554.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.234.973.182

15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bps Provinsi (2886) sebesar Rp4179551000 dengan realisasi belanja sebesar Rp3737947847.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	2.720.928.026	3.070.563.832	(11,39)
BELANJA BARANG	2.807.525.315	4.210.965.287	(33,33)
BELANJA MODAL	652.980.000	0	0,00
Jumlah Bruto	6.181.433.341	7.281.529.119	(15,11)
Pengembalian Belanja	365.072	14.070.703	(97,41)
Jumlah	6.181.068.269	7.267.458.416	(14,95)

Secara keseluruhan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.086.390.147 atau sebesar 14,95 persen dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp349.635.806 atau sebesar 11,39 persen dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022. Penurunan realisasi Belanja Pegawai pada periode Tahun Anggaran 2023 terjadi pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Lembur, dan Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito. Penurunan ini disebabkan karena adanya mutasi keluar pegawai.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.403.439.972 atau sebesar 33,33 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2022. Penurunan realisasi Belanja Barang pada periode Tahun Anggaran 2023 terjadi pada realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi terhadap barang persediaan, barang pendukung kegiatan operasional dan non operasional serta perjalanan dalam negeri. Hal ini terkait dengan berkurangnya anggaran Belanja Barang disebabkan berkurangnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp652.980.000 atau sebesar 00,00 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2022. Peningkatan realisasi Belanja Modal pada periode Tahun Anggaran 2023 terjadi pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Peningkatan realisasi disebabkan pembelian peralatan dan mesin berupa Station Wagon

sebanyak 1 (satu) unit, PC sebanyak 10 (sepuluh) unit, UPS sebanyak 10 (sepuluh) unit, dan Scanner sebanyak 1 (satu) unit. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi Belanja Modal.

Per 31 Desember 2023 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp365.072 yang berasal dari pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp365.000 dan pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp72. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp72 atas kekurangan gaji PNS atas nama Basaruddin Barata dan Totok Arianto. Sementara, pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp365.000 atas kekurangan tunjangan umum PNS atas nama Dwi Cahyo Firmansyah dan Muhammad Hidayat.

*Belanja Pegawai
Rp2.720.562.954*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.720.562.954 dan Rp3.056.493.129. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.316.909.733	1.486.791.720	(11,43)
Belanja Lembur	110.189.000	127.143.000	(13,33)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.293.829.293	1.456.629.112	(11,18)
Jumlah Bruto	2.720.928.026	3.070.563.832	(11,39)
Pengembalian Belanja	365.072	14.070.703	(97,41)
Jumlah	2.720.562.954	3.056.493.129	(10,99)

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (10,99) persen dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 11,43 persen dibandingkan 31

Desember 2022 disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi keluar.

2. Belanja Lembur per 31 Desember 2023 mengalami penurunan 13,33 persen dibandingkan 31 Desember 2022 disebabkan berkurangnya permintaan lembur selama Tahun Anggaran 2023.
3. Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per 31 Desember 2023 mengalami penurunan 11,18 persen dibandingkan 31 Desember 2022 disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi keluar.
4. Realisasi pengembalian belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 97,41 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp365.072 berasal dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp72 atas kekurangan gaji PNS atas nama Basaruddin Barata dan Totok Arianto serta pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp365.000 atas kekurangan tunjangan umum PNS atas nama Dwi Cahyo Firmansyah dan Muhammad Hidayat.

Belanja Barang
Rp2.807.525.315

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.807.525.315 dan Rp4.210.965.287.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	334.016.587	353.998.177	(5,64)
Belanja Barang Non Operasional	1.328.180.750	2.516.444.236	(47,22)
Belanja Barang Persediaan	126.372.070	160.909.214	(21,46)
Belanja Jasa	119.737.297	80.433.573	48,86
Belanja Pemeliharaan	117.718.978	109.924.463	7,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	781.499.633	989.255.624	(21,00)
Jumlah Bruto	2.807.525.315	4.210.965.287	(33,33)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	2.807.525.315	4.210.965.287	(33,33)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (33,33) persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Beberapa penjelasan terkait Belanja Barang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum, penurunan Belanja Barang disebabkan karena menurunnya anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Penurunan anggaran ini berdampak pada menurunnya Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Namun, apabila dilihat dari persentase realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 98,23 persen, menunjukkan bahwa seluruh anggaran Belanja Barang telah digunakan secara optimal untuk pemenuhan sasaran capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023.
2. Realisasi Belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen disebabkan peningkatan Belanja Jasa Profesi dan Belanja Jasa Lainnya. Belanja Jasa Profesi mengalami peningkatan karena berkaitan dengan pembayaran Honor Narasumber FKP Pendataan Awal Regsosek. Sementara, peningkatan Belanja Jasa Lainnya disebabkan karena meningkatnya belanja Biaya Jasa Manajemen Building pada Tahun Anggaran 2023.
3. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 7,09 persen karena terdapat perbaikan besar yang dilakukan terhadap aset di BPS Kota Bontang hingga periode 31 Desember 2023. Peningkatan realisasi Belanja Pemeliharaan disumbang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
4. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat pengembalian Belanja Barang.

Belanja Modal
Rp652.980.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp652.980.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	652.980.000	0	0,00
Jumlah Bruto	652.980.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	652.980.000	0	0,00

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2023 sebesar 0,00 persen dibandingkan 31 Desember 2022 disebabkan oleh peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Beberapa rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan oleh BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Station Wagon merek Kijang Innova 2.0 G MT tipe TGN140R-MDMSKD sebanyak 1 unit dengan BAST No. 180/PPK/BPS-BONTANG/03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 334.700.000.
2. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa PC Acer Vetron X iCore 7 sebanyak 10 unit senilai Rp279.700.000; UPS ICA CN 650 sebanyak 10 unit senilai Rp17.600.000; dan Scanner Fujitsu FI-8150 U ADF sebanyak 1 unit senilai Rp 20.980.000 dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp652.980.000 dan Rp0.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31
Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	652.980.000	0	0,00
Jumlah Bruto	652.980.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	652.980.000	0	0,00

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2023, mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Adapun Belanja Modal yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Station Wagon merek Kijang Innova 2.0 G MT tipe TGN140R-MDMSKD sebanyak 1 unit dengan BAST No. 180/PPK/BPS-BONTANG/03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 334.700.000.
2. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa PC Acer Vetron X iCore 7 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 279.700.000.
3. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa UPS ICA CN 650 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 17.600.000.
4. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Scanner Fujitsu FI-8150 U ADF sebanyak 1 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 20.980.000.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar di Muka Rp3.522.137

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.522.137 dan Rp20.375.898. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 13
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3.522.137	20.375.898
Jumlah	3.522.137	20.375.898

Belanja barang yang dibayar di muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.522.137. Nilai ini terdiri dari komponen sebagai berikut.

- Belanja langganan listrik sebesar 2070,70 kWh senilai Rp3.522.137 berupa sisa token listrik.

Nilai belanja barang yang dibayar di muka per 31 Desember 2023 lebih kecil nilainya dibanding per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada Desember 2022 terdapat belanja sewa dibayar di muka dalam rangka pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Namun, saldo tersebut sudah habis per 30 November 2023.

Persediaan Rp65.313.890

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp65.313.890 dan Rp103.117.440. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	64.411.090	101.917.440
Bahan untuk Pemeliharaan	902.800	1.200.000
Jumlah	65.313.890	103.117.440

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	103.117.440
Mutasi Tambah :	
Pembelian	126.372.070
Transfer Masuk	71.640.348
Total Mutasi Tambah :	198.012.418
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(206.003.120)
Usang	(29.812.848)
Total Mutasi Kurang :	(235.815.968)
Kenaikan(Penurunan)	(37.803.550)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	65.313.890

Per 31 Desember 2023 terdapat mutasi tambah persediaan sebesar Rp198.012.418. Mutasi penambahan persediaan terdiri dari Pembelian dan Transfer Masuk. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah persediaan adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.372.070 terdiri atas pembelian Barang Konsumsi senilai Rp119.197.570 dan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp7.174.500.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp71.640.348 merupakan transfer barang persediaan dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa:
 1. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-317/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yang terdiri dari 25 tiras kuesioner SKSPPI, dan 5 tiras buku pedoman SKSPPI senilai Rp343.750.

2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-304/64512/PL.714/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023 yang terdiri dari 163 tiras kuesioner VSERUTI23.INTI, dan 163 tiras kuesioner VSERUTI23.MAK senilai Rp4.930.750.
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-189/64512/PL.714/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang terdiri dari 3 tiras kuesioner buku pedoman SKTNP Barang, 3 tiras kuesioner SKTNP Barang 2023 Tahap 2, 3 tiras kuesioner SKTNP Barang 2023 Tahap 3, 3 tiras kuesioner SKTNP Barang 2023 Tahap 4, 6 tiras buku pedoman SKTNP Jasa, 25 tiras kuesioner SKTNP Jasa 2023 Tahap 2, 25 tiras kuesioner SKTNP Jasa 2023 Tahap 3, 25 tiras kuesioner SKTNP Jasa 2023 Tahap 4, 8 tiras dokumen SINASI 2023, dan 85 tiras kuesioner SINASI 2023 senilai Rp2.453.100.
4. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-289/64512/PL.714/04/2023 Tanggal 10 April 2023 yang terdiri dari 15 tiras Buku 1 Pedoman FKP, 15 tiras Buku 2 Suplemen Pedoman Untuk Fasilitator FKP, 14 tiras alat peraga FKP, 15 tiras Cue Card Fasilitator FKP, 14 tiras Cue Card Asisten Fasilitator FKP, dan 1313 buah ballpoint peserta FKP 2023 senilai Rp3.027.470.
5. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-170/64512/PL.714/04/2023 Tanggal 3 April 2023 yang terdiri dari 4 tiras buku pedoman pencacahan SPDT IHPB 2023 dan 2 tiras buku pedoman pemeriksaan SPDT IHPB 2023 senilai Rp290.800.
6. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-180/64512/PL.714/04/2023 Tanggal 3 April 2023 yang terdiri dari 33 tiras kuesioner VH TL, 6 tiras kuesioner VDTW, 4 tiras kuesioner VREST UMB, 3 tiras buku pedoman pencacahan dan pengawas VH TL, 2 tiras buku pedoman pencacahan dan pengawas VDTW, 2 tiras buku pedoman pencacahan dan pengawas VREST UMB, dan 2 tiras pedoman Updating Direktori Usaha Penyedia Jasa Pariwisata senilai Rp871.350.
7. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-267/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 22 set kuesioner SLK Koperasi Simpan Pinjam 2023, dan 22 set Surat Permohonan Data Survei Lembaga Keuangan 2023 senilai Rp60.588.
8. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-257/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 54 set kuesioner Uji Coba Survei Terintegrasi PDN, 54 set Kartu Kendali Uji Coba Survei Terintegrasi PDN (2), dan 4 buku pedoman lapangan Uji Coba Survei Terintegrasi PDN senilai Rp239.346.
9. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-206/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret

- 2023 yang terdiri dari 64 set kuesioner Survei Perdagangan Antar Wilayah 2023 (PAW), 5 buku pedoman pencacahan lapangan Survei Perdagangan Antar Wilayah 2023, 15 set kuesioner Survei Pola Distribusi Barang 2023, 1 buku pedoman lapangan Survei Pola Distribusi Barang 2023, 14 set kuesioner STKU-G 2023, 13 set kuesioner STKU-H 2023, 19 set kuesioner STKU-J 2023, 8 set kuesioner STKU-K 2023 senilai Rp255.938 .
10. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-216/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 2 set kuesioner STPP Migas, 1 set kuesioner Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih, 24 set kuesioner Survei Captive Power, 3 lembar kuesioner Updating Direktori PPE, 4 set kuesioner Survei TW Perusahaan Air Bersih, dan 1 buku pedoman pencacahan Survei Tambang Energi 2023 senilai Rp95.665.
 11. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-236/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 16 set kuesioner STPIM II-A Tahun 2023, 7 set Kartu Kendali Survei IBS, dan 7 set amplop coklat Survei IBS senilai Rp38.797.
 12. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-277/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 46 set kuesioner Survei Konstruksi Tahunan SKTH 2022, 36 set kuesioner Survei Konstruksi Triwulanan SKTR 2023, 60 set Sampel Usaha Konstruksi Perorangan 2023 SKP23-S, dan 38 set Surat Pengantar Survei Konstruksi 2023 senilai Rp160.258.
 13. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-247/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 50 set kuesioner SKLNPT 2023 senilai Rp44.800.
 14. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-226/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang terdiri dari 14 set kuesioner Survei IMK VIMK 2023 dan 5 set Lembar Klasifikasi dan Kasus Batas IMK senilai Rp25.755.
 15. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-094/64512/PL.714/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023 yang terdiri dari 670 tiras Kuesioner Susenas VSEN23.K dan 670 tiras Kuesioner Susenas VSEN23.KP senilai Rp16.750.000;.
 16. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-110/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 1 Maret 2023 yang terdiri dari 162 tiras Kuesioner VSERUTI23.INTI senilai Rp1.782.000.
 17. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-120/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 2 Maret 2023 yang terdiri dari 2 tiras Buku 1 Pedoman Pimpinan Susenas Maret 2023, 55 tiras Buku 2 Pedoman Pencacah

- Susenas Maret 2023, 18 tiras Buku 3 Pedoman Pengawas Susenas Maret 2023, 55 tiras Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2023, 55 tiras Buku 5 Pemanfaatan Data Susenas Maret 2023, 55 tiras Kuesioner Susenas VSEN23.DSBS, 55 tiras Kuesioner Susenas VSEN23.P, dan 55 tiras Kuesioner Susenas VSEN23.DSRT senilai Rp11.662.550.
18. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-130/64512/PL.714/03/2023 Tanggal 2 Maret 2023 yang terdiri dari 158 tiras Kuesioner SAK.FEB23.AK, 8 tiras Buku Pedoman Pencacah Sakernas 2023, 3 tiras Buku Pedoman Pemeriksa Sakernas 2023, dan 3 tiras Buku Kode Sakernas 2023 senilai Rp4.184.000.
 19. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-331/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang terdiri dari 1 buku Pedoman Survei Konstruksi 2023, 38 set Rekomendasi PU Survei Konstruksi 2023, 40 set Kartu Kendali Survei Konstruksi 2023, 1 buah Tanda Terima Dokumen Survei Konstruksi 2023, dan 38 set Leaflet Statistik Konstruksi 2022 senilai Rp242.792.
 20. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-340/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang terdiri dari 2 set Surat Pengantar STPP Migas, 1 set Surat Pengantar STP Air Bersih, 24 set Surat Pengantar Survei Captive Power, dan 4 set Surat Pengantar Survei Tw Perusahaan Air Bersih senilai Rp12.202.
 21. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-350/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang terdiri dari 11 set Kuesioner SKLNP 2023, 1 set Pedoman SKLNP 2023, 13 set Kuesioner NTA 2023, 10 set Lembar Tambahan NTA 2023, 2 set Pedoman NTA 2023, 6 set Kuesioner SKPS 2023, dan 1 set Pedoman SKPS 2023 senilai Rp109.302.
 22. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-360/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang terdiri dari 9 set Daftar PP-TPI 2023 dan 1 tiras Kuesioner TSL 2023 senilai Rp16.798.
 23. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-370/64512/PL.714/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang terdiri dari 1 set Surat Pengantar Kab/Kot SSK Pemerintah 2023, 3 set Dokumen K2 2023, dan 3 set Dokumen APBD2 2023 senilai Rp34.906.
 24. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-403/64512/PL.714/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri dari 650 tiras Kuesioner SAK.AGS2023-AK, 39 tiras Buku Pedoman Pencacah SAK.AGS23, 13 tiras Buku Pedoman Pemeriksa SAK.AGS23, dan 13 tiras Buku Kode SAK.AGS23 senilai Rp17.656.600.

25. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-413/64512/PL.714/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri dari 302 tiras Kuesioner VSERUTI23.INTI Triwulan 2 dan 302 tiras Kuesioner VSERUTI23.MAK Triwulan 2 senilai Rp3.895.800.
26. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-441/64512/PL.714/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri dari 10 set Kuesioner BUMD 2023 senilai Rp38.030.
27. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-454/64512/PL.714/08/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari 5 buah Pigura Besar senilai Rp180.000.
28. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-464/64512/PL.714/08/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari 43 tiras Kuesioner Survei Kesejahteraan Petani 2023, 4 tiras Pedoman Pencacah Survei Kesejahteraan Petani 2023, dan 1 tiras Pedoman Pemeriksa Survei Kesejahteraan Petani 2023 senilai Rp610.900.
29. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-492/64512/PL.714/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang terdiri dari 63 tiras Kuesioner VIMK23-L2 (2), dan 201 tiras Kuesioner VIMK23-S2 (2) senilai Rp354.204.
30. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-526/64512/PL.714/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 yang terdiri dari 1 Tiras Publikasi Proyeksi Penduduk Kab/Kota senilai Rp315.789.
31. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-555/64512/PL-714/12/2023 Tanggal 8 Desember 2023 yang terdiri dari 78 set Daftar Sub-S Survei Ubinan, 5 set Daftar SP-Lahan, SP-Alsintan, 5 set Daftar SP-Palawija 2023, dan 1 buku Rekap Kab/Kota SP Tanaman senilai Rp168.540.
32. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-566/64512/PL-714/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang terdiri dari 24 Buku Kasus Batas KBLI 2020 senilai Rp323.688
33. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-586/64512/PL-714/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang terdiri dari 2 tiras Pedoman Pencacahan SHProd, 1 tiras Pedoman Pemeriksaan SHProd, 61 tiras Kuesioner HP 2024, 13 tiras Kuesioner HP-JP 2024, dan 7 tiras Suplemen SHProd 2024 senilai Rp457.800.
34. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-622/64512/PL-714/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang terdiri dari 4 set Kuesioner PP-TPI TW 2024 senilai Rp6.080.

Per 31 Desember 2023 terdapat mutasi kurang persediaan sebesar Rp235.815.968. Mutasi pengurangan persediaan terdiri atas Pemakaian dan Barang Usang. Beberapa penjelasan terkait mutasi kurang persediaan adalah sebagai berikut.

- a. Pengurangan persediaan yang berasal dari pemakaian persediaan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.003.120. Pemakaian ini terdiri atas pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp198.531.420 dan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp7.471.700.
- b. Pengurangan persediaan yang berasal dari pengajuan barang konsumsi usang senilai Rp29.812.848. Barang usang dengan BAST No B-235/64741/PL.810/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 terdiri dari 4800 set Kuesioner K Regsosek 2022, 41 unit Buku 1E (Pedoman Kortim), 170 unit Buku 1F (Pedoman Pencacahan), 40 unit Buku 1G (Pedoman Pengkodean), 113 unit Rompi Petugas SP2020, 17.313 unit Kuesioner CI SP2020 I, 141 unit Kuesioner RC1 SP2020 I, 10 unit Box Besar 2 SP2020 I, 259 unit Box sedang SP2020 I, dan 30 unit Box kecil SP2020 I.

Tanah
Rp1.504.778.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.504.778.000 dan Rp1.504.778.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	1.504.778.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	1.504.778.000

Tanah bangunan rumah negara Gol. I seluas 271 m² senilai Rp 129.000.000 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan untuk rumah dinas Kepala BPS Kota Bontang dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00038 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah Kantor seluas 796 m2 senilai Rp 292.237.000 yang terletak di Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, bersumber dari pembelian dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00039 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan rumah dan tanah kantor tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

Peralatan dan Mesin **C.4 Peralatan dan Mesin**
Rp2.337.354.471

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.337.354.471 dan Rp1.648.571.967. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	1.648.571.967
Mutasi Tambah :	
Pembelian	652.980.000
Transfer Masuk	35.802.504
Total Mutasi Tambah	688.782.504
:	
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang	0
:	
Kenaikan(Penurunan)	688.782.504
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	2.337.354.471
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023	(1.591.156.410)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	746.198.061

Per 31 Desember 2023 terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp688.782.504. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin terdiri atas Pembelian dan Transfer Masuk. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp652.980.000 terdiri atas:
1. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Station Wagon merek Kijang Innova 2.0 G MT tipe TGN140R-MDMSKD sebanyak 1 buah dengan BAST No. 180/PPK/BPS-BONTANG/03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023.
 2. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa PC Acer Vetron X iCore 7 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 279.700.000.
 3. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa UPS ICA CN 650 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 17.600.000.
 4. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Scanner Fujitsu FI-8150 U ADF sebanyak 1 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 20.980.000.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp35.802.504 merupakan transfer peralatan dan mesin dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa 2 unit P.C. Unit Merk ThinkCentre M720t dengan BAST No. B-421/64512/PL.714/BASTP.BMN/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp35.802.504.

Tidak terdapat mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin hingga selama Tahun Anggaran 2023. Peralatan dan Mesin yang ada di BPS Kota Bontang dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.874.089.197*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.874.089.197 dan Rp2.874.089.197. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	2.874.089.197
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	2.874.089.197
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023	(223.370.430)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	2.650.718.767

Gedung dan Bangunan terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp 2.574.717.197; Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp 208.480.000; dan Pagar Permanen senilai Rp 90.892.000. Gedung dan Bangunan tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Aset Tetap Lainnya
Rp102.281.121*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp102.281.121 dan Rp102.281.121. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	102.281.121
Mutasi Tambah :	—
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	—
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	102.281.121
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	102.281.121

Aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak senilai Rp102.281.121. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.814.526.840*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp1.814.526.840 dan Rp1.481.975.254. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.337.354.471	1.591.156.410	746.198.061
Gedung dan Bangunan	2.874.089.197	223.370.430	2.650.718.767
Aset Tetap Lainnya	102.281.121	0	102.281.121
Jumlah	5.313.724.789	1.814.526.840	3.499.197.949

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp5.313.724.789 mengalami penyusutan sebesar Rp1.814.526.840 sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai penyusutan ini disumbangkan dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp1.591.156.410 serta akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp223.370.430. Penyusutan ini menyebabkan per 31 Desember 2023 Nilai Buku Aset Tetap BPS Kota Bontang menjadi sebesar Rp3.499.197.949.

*Aset Tak Berwujud
Rp25.700.000*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	25.700.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	25.700.000
Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023	(25.700.000)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	0

Pada aset tidak berwujud, tidak terdapat mutasi penambahan maupun mutasi pengurangan per 31 Desember 2023. Adapun akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.700.000 sehingga nilai buku menjadi Rp 0.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp25.700.000*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp25.700.000 dan Rp22.487.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	25.700.000	0
Jumlah	25.700.000	25.700.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp100.257.612

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.257.612 dan Rp104.130.570. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2023 dan 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	99.046.273	102.819.231
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.211.339	1.311.339
Jumlah	100.257.612	104.130.570

- a. Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 untuk 22 pegawai sebesar Rp99.046.273.
- b. Pembayaran belanja barang berupa Langganan Internet Bulan Desember 2023 sebesar Rp1.033.357, Langganan Air Bulan Desember 2023 sebesar Rp143.625, dan Langganan Telepon Bulan Desember 2023 sebesar Rp34.357.

Ekuitas
Rp4.972.554.364

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.972.554.364 dan Rp4.670.320.299. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB
Rp1.951.640*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.951.640 dan Rp1.921.644. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.921.644	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	29.996	0	0,00
Jumlah	1.951.640	1.921.644	1,56

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp1.921.644 berasal dari sewa rumah dinas pejabat Eselon III yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Bontang. Nilai PNB ini diperoleh dari biaya sewa rumah dinas selama Januari sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp1.921.644.

Sementara, Pendapatan Anggaran Lain-Lain senilai Rp29.996 berasal dari koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai Rp29.996 dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.

Tabel 20

Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.921.644	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	29.996	29.996	0
Jumlah	1.951.640	1.951.640	0

Nilai Laporan operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran PNBPN Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Anggaran Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sama. Sehingga tidak terdapat selisih antara nilai LO dan LRA.

*Beban Pegawai
Rp2.716.789.996*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.716.789.996 dan Rp3.054.426.661. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	901.557.180	991.949.600	(9,11)
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.162	21.016	(13,58)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.765.770	49.270.550	13,18
Beban Tunj. Anak PNS	12.915.794	14.206.640	(9,09)
Beban Tunj. Struktural PNS	19.260.000	37.080.000	(48,06)
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.420.000	118.620.000	4,05
Beban Tunj. PPh PNS	1.730.395	3.145.849	(44,99)
Beban Tunj. Beras PNS	47.652.360	50.404.320	(5,46)
Beban Uang Makan PNS	140.235.000	180.824.000	(22,45)
Beban Tunjangan Umum PNS	13.990.000	26.785.000	(47,77)
Beban Uang Lembur	110.189.000	127.143.000	(13,33)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.290.056.335	1.454.976.686	(11,33)
Jumlah	2.716.789.996	3.054.426.661	(11,05)

Beban Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 11,05 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Beberapa penjelasan terkait beban pegawai diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum penurunan Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunj. Anak PNS, Beban Tunj. PPh PNS, Beban Tunj. Beras PNS, Beban Uang Makan PNS, Beban Tunjangan Umum PNS, dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) disebabkan oleh mutasi keluar pegawai BPS Kota Bontang.
- b. Penurunan Beban Tunj. Struktural PNS dan peningkatan Beban Tunj. Fungsional PNS disebabkan perubahan jabatan struktural menjadi fungsional yang semakin menyeluruh pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022.
- c. Peningkatan Beban Tunj. Suami/Istri PNS disebabkan beberapa pegawai yang melangsungkan pernikahan di Tahun Anggaran 2023.
- d. Penurunan Beban Uang Lembur disebabkan menurunnya permintaan lembur selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	901.557.180	901.557.180	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.162	18.162	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.765.770	55.765.770	0
Beban Tunj. Anak PNS	12.915.794	12.915.794	0
Beban Tunj. Struktural PNS	19.260.000	19.260.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.420.000	123.420.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	1.730.395	1.730.395	0
Beban Tunj. Beras PNS	47.652.360	47.652.360	0
Beban Uang Makan PNS	140.235.000	140.235.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	13.990.000	13.990.000	0
Beban Uang Lembur	110.189.000	110.189.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.290.056.335	1.293.829.293	(3.772.958)
Jumlah	2.716.789.996	2.720.562.954	(3.772.958)

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Pegawai per 31 Desember 2023:

- Selisih Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar (Rp3.772.958) merupakan selisih Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2023 senilai (Rp102.819.231) dengan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai Rp99.046.273.

*Beban Persediaan
Rp198.531.420*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp198.531.420 dan Rp269.001.313. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 23
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	198.531.420	269.001.313	(26,20)
Jumlah	198.531.420	269.001.313	(26,20)

Beban Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar 26,20 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja barang di Tahun Anggaran 2023 yang kemudian berpengaruh terhadap konsumsi barang persediaan.

*Beban Barang dan Jasa
Rp1.798.688.395*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.798.688.395 dan Rp2.930.548.662. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	236.264.587	266.508.464	(11,35)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	391.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.752.000	86.280.000	13,30
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	828.000	(100,00)
Beban Bahan	164.214.750	319.723.546	(48,64)
Beban Honor Output Kegiatan	1.138.960.501	2.143.113.000	(46,85)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.188.339	12.794.040	(82,90)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13.596.450	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.993.000	4.995.000	40,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	15.824.160	22.222.200	(28,79)
Beban Langganan Listrik	49.540.156	43.964.207	12,68
Beban Langganan Telepon	412.284	421.710	(2,24)
Beban Langganan Air	3.614.625	3.254.400	11,07
Beban Sewa	18.301.355	1.698.645	977,41
Beban Jasa Profesi	16.000.000	2.900.000	451,72
Beban Jasa Lainnya	48.622.638	2.368.000	1.953,32
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5.490.000	(100,00)
Jumlah	1.798.688.395	2.930.548.662	(38,62)

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 38,62 persen dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2022. Beberapa penjelasan terkait Beban Barang dan Jasa diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum, penurunan Beban Barang seperti Beban Keperluan Perkantoran, Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Barang Non Operasional Lainnya disebabkan karena menurunnya anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2023. Penurunan anggaran belanja barang ini berkaitan dengan menurunnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.
- b. Penurunan Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar 100,00 persen disebabkan akun tersebut tidak dipakai di Tahun Anggaran 2023.
- c. Peningkatan Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar 13,30 persen disebabkan oleh meningkatnya Honor Operasional Satuan Kerja untuk jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara.
- d. Peningkatan Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar 40,00 persen disebabkan pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi berupa paket CCTV senilai Rp6.993.000 sesuai BAST No. 710/PPK/BPS-BONTANG/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- e. Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel senilai Rp15.824.160 berupa pembuatan Kanopi atau Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen senilai Rp15.824.160 sesuai BAST No. 699/PPK/BPS-BONTANG/11/2023.
- f. Secara umum, peningkatan Beban Langganan Listrik dan Beban Langganan Air disebabkan konsumsi listrik dan air yang meningkat di Tahun Anggaran 2023.
- g. Peningkatan Beban Sewa sebesar 977,41 persen disebabkan adanya belanja sewa gudang dibayar di muka dalam rangka Pendataan Awal Regsosek 2022 yang nilainya habis di periode November 2023.
- h. Peningkatan Beban Jasa Profesi sebesar 451,72 persen disebabkan pembayaran Honor Narasumber FKP Pendataan Awal Regsosek.
- i. Peningkatan Beban Jasa Lainnya sebesar 1.953,32 persen disebabkan penggunaan Jasa Manajemen Building sebesar Rp48.622.638 selama Tahun Anggaran 2023.
- j. Tidak terdapat beban yang menggunakan akun Covid-19 selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 25
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	236.264.587	236.234.587	30.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	30.000	(30.000)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.752.000	97.752.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Bahan	164.214.750	164.214.750	0
Beban Honor Output Kegiatan	1.138.960.501	1.138.960.501	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.188.339	2.188.339	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.993.000	6.993.000	0
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	15.824.160	15.824.160	0
Beban Langganan Listrik	49.540.156	50.987.750	(1.447.594)
Beban Langganan Telepon	412.284	412.284	0
Beban Langganan Air	3.614.625	3.714.625	(100.000)
Beban Sewa	18.301.355	0	18.301.355
Beban Jasa Profesi	16.000.000	16.000.000	0
Beban Jasa Lainnya	48.622.638	48.622.638	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Jumlah	1.798.688.395	1.781.934.634	16.753.761

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023:

- Selisih Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp30.000 dan Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar (Rp30.000) karena penyesuaian jurnal Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat menjadi Belanja Keperluan Perkantoran.

- Selisih Beban Langganan Listrik senilai (Rp1.447.594) merupakan selisih sisa token listrik per 31 Desember 2022 senilai Rp2.074.543 dengan sisa token listrik per 31 Desember 2023 senilai (Rp3.522.137).
- Selisih Beban Langganan Air senilai (Rp100.000) merupakan selisih beban langganan air bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari 2023 senilai (Rp243.625) dengan beban langganan air bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai Rp143.625.
- Selisih Beban Sewa senilai Rp18.301.355 karena adanya belanja sewa gudang dibayar di muka pada bulan Desember 2022 sebesar Rp 18.301.355 untuk periode 1 Januari-30 November 2023 dalam rangka Pendataan Awal Regsosek 2022.

*Beban
Pemeliharaan
Rp125.190.678*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp125.190.678 dan Rp116.855.963. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.984.100	61.106.325	4,71
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.734.878	48.818.138	10,07
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.471.700	6.931.500	7,79
Jumlah	125.190.678	116.855.963	7,13

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,13 persen yang disumbang dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan besar yang dilakukan terhadap aset seperti gedung, halaman, serta peralatan dan mesin yang ada di BPS Kota Bontang.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.984.100	63.984.100	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.734.878	53.734.878	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.471.700	0	7.471.700
Jumlah	125.190.678	117.718.978	7.471.700

Beban pemeliharaan senilai Rp7.471.700 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan tidak menimbulkan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan karena pencatatan kode barang dalam aplikasi persediaan menggunakan kode barang bahan pemeliharaan tetapi realisasi anggaran belanjanya menggunakan akun belanja persediaan barang konsumsi, bukan belanja pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp781.499.633

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp781.499.633 dan Rp989.255.624. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 28
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	319.850.299	284.722.274	12,34
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.522.000	65.470.000	(44,22)
Beban Perjalanan	410.019.000	627.873.350	(34,70)

Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.108.334	11.190.000	35,02
Jumlah	781.499.633	989.255.624	(21,00)

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 21,00 persen. Secara umum, penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan karena menurunnya anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2023. Penurunan anggaran belanja barang ini berkaitan dengan menurunnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	319.850.299	319.850.299	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.522.000	36.522.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	410.019.000	410.019.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.108.334	15.108.334	0
Jumlah	781.499.633	781.499.633	0

Tidak terdapat selisih nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp299.961.582

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp299.961.582 dan Rp240.987.972. Beban Penyusutan merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.635.782	176.449.672	35,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.113.300	58.113.300	0,00
Beban Amortisasi Software	3.212.500	6.425.000	(50,00)
Jumlah	299.961.582	240.987.972	24,47

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan 24,47 persen, hal ini diantaranya meningkatnya beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan serta beban amortisasi software karena berkurangnya masa manfaat aset dan penghentian aset dari penggunaan.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional **D.8 Kegiatan Non Operasional**
Rp29.812.848

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	2.039.010	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja	0	15.120.000	(100,00)

Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2.414.250	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	29.812.848	0	0,00
Jumlah	(29.812.848)	15.495.240	(292,40)

Beberapa penjelasan terkait Pos Kegiatan Non Operasional diuraikan sebagai berikut.

- a. Per 31 Desember 2023 terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Beban Persediaan Rusak/Usang senilai Rp29.812.848 sehingga menyebabkan defisit Pos Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp29.812.848). beban persediaan rusak/usang senilai Rp 29.812.848. Persediaan usang ini diajukan dengan BAST No B-235/64741/PL.810/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 dengan rincian:
 - 4800 set Kueisoner K Regsosek 2022 senilai Rp 5.280.000;
 - 41 unit Buku 1E (Pedoman Kortim) senilai Rp 561.700;
 - 170 unit Buku 1F (Pedoman Pencacahan) senilai Rp 2.261.000;
 - 40 unit Buku 1G (Pedoman Pengkodean) senilai Rp 396.000;
 - 113 unit Rompi Petugas SP2020 senilai Rp 9.281.481;
 - 17.313 unit Kuesioner CI SP2020 I senilai Rp 10.491.678;
 - 141 unit Kuesioner RC1 SP2020 I senilai Rp 19.881;
 - 10 unit Box Besar 2 SP2020 I senilai Rp 201.560;
 - 259 unit Box sedang SP2020 I senilai Rp 1.225.588;
 - 30 unit Box kecil SP2020 I senilai Rp 93.960.
- b. Tidak terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar, Beban Pelepasan Aset Non Lancar, dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama Tahun Anggaran 2023.
- c. Tidak terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya selama periode Tahun Anggaran 2023. Sehingga, apabila dibandingkan per 31 Desember 2022 terdapat penurunan sebesar 100,00 persen.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.670.320.299

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.670.320.299 dan Rp4.875.904.258.

Nilai Ekuitas Awal tersebut mengalami penurunan pada 1 Januari 2023 apabila dibandingkan dengan 1 Januari 2022.

Defisit LO
Rp5.948.522.912

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.948.522.912 dan Rp7.583.659.311. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp6.250.756.977

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.250.756.977 dan Rp7.378.075.352. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 32
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.181.068.269	7.267.458.416
Diterima dari Entitas Lain	(1.951.640)	(17.041.644)
Transfer Masuk	71.640.348	127.658.580
Jumlah	6.250.756.977	7.378.075.352

Beberapa penjelasan terkait Nilai Transaksi antar Entitas diuraikan sebagai berikut.

- a. Transaksi yang ditagihkan ke entitas lain senilai Rp6.181.068.269 merupakan realisasi anggaran yang diajukan ke KPPN Samarinda s.d. 31 Desember 2023.
- b. Transaksi yang diterima dari entitas lain sebesar (Rp1.951.640) terbentuk dari beberapa komponen yaitu:

- Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2023 sebesar (Rp1.921.644).
 - Pendapatan Lain-Lain berupa koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai (Rp29.996) dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.
- c. Transfer Masuk senilai Rp71.640.348 merupakan transfer persediaan berupa barang konsumsi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar minus Rp1.951.640 sedangkan DKEL sebesar Rp6.181.068.269.

Nilai Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp1.951.640) diperoleh dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2023 sebesar (Rp1.921.644). Selain itu, terdapat Pendapatan Lain-Lain berupa koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai (Rp29.996) dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp6.181.068.269 berasal dari realisasi belanja hingga 31 Desember 2023 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.720.562.954, realisasi Belanja Barang Rp2.807.525.315, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp652.980.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp71.640.348. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Per 31 Desember 2023 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp71.640.348 dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa Barang Konsumsi senilai Rp71.640.348. Selain itu per 31 Desember 2023 terdapat Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa 2 unit P.C. Unit Merk ThinkCentre M720t dengan BAST No. B-421/64512/PL.714/BASTP.BMN/07/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp35.802.504.

Tabel 33
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2023

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SKSPPI Tahun 2023	343.750	343.750
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SERUTI Triwulan 2 Tahun 2023	4.930.750	4.930.750
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SKTNP Barang, SKTNP Jasa, dan SINASI 2023	2.453.100	2.453.100
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Instrumen FKP Regsosek	3.027.470	3.027.470
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SPDT IHPB Tahun 2023	290.800	290.800
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Statistik Bidang Jasa Pariwisata 2023	871.350	871.350
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Statistik Keuangan	60.588	60.588
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Terintegrasi PDN	239.346	239.346
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei PDN/Poldis 2023	255.938	255.938

BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Pertambangan 2023	95.665	95.665
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei IBS 2023	38.797	38.797
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Perusahaan Konstruksi 2023	160.258	160.258
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei SKLNPT 2023	44.800	44.800
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei VIMK Triwulan 2023	25.755	25.755
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Seruti Maret 2023	16.750.000	16.750.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Seruti Maret 2023	1.782.000	1.782.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Seruti Maret 2023	11.662.550	11.662.550
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Sakernas Februari 2023	4.184.000	4.184.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Konstruksi 2023	242.792	242.792
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Pertambangan 2023	12.202	12.202
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SKLNP 2023, NTA 2023, dan SKPS 2023	109.302	109.302
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei TPI dan TSL 2023	16.798	16.798
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SSK Pemerintah 2023	34.906	34.906
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Sakernas Agustus 2023	17.656.600	17.656.600
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Seruti	3.895.800	3.895.800
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei BUMD	38.030	38.030

BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Pigura	180.000	180.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Kesejahteraan Petani 2023	610.900	610.900
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei IMK23 Semester 2	354.204	354.204
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Buku Proyeksi Penduduk Kab/Kota	315.789	315.789
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Instrumen Survei Ubinan	168.540	168.540
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Buku Kasus Batas KBLI 2020	323.688	323.688
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SHProd dan HP-JP 2024	457.800	457.800
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen PP-TPI TW 2024	6.080	6.080
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peralatan dan Mesin	2 unit P.C. Unit Merk ThinkCentre M720t	35.802.504	-
Jumlah			107.442.852	71.640.348

Ekuitas Akhir
Rp4.972.554.364

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.972.554.364 dan Rp4.670.320.299.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 122/6474/2022 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Desember 2022, pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2023 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	:	Tania Viona Sirait, S.Tr.Stat.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Diah Rukmana Sari, S.Tr.Stat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 020/6474/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 122/6474/2022 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 Maret 2023, ditetapkan penggantian Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM dan Bendahara. Per 1 Maret 2023 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2023 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara	:	Ilmiah Sukanthi, SE.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Diah Rukmana Sari, S.Tr.Stat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 114/6474/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 020/6474/2023 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 November 2023, ditetapkan penggantian Pejabat Pengurus/ Penyimpan BMN. Per 1 Desember 2023 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2023 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara	:	Ilmiah Sukanthi, SE.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Ananda Trinita Nurazizah, A.Md.Stat.

2. BPS Kota Bontang memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran BPG 046 BPS KOTA BONTANG di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – KC BONTANG dengan nomor rekening 8100126372371000 berdasarkan persetujuan rekening dari KPPN Samarinda No. S-430/PB.3/2021 tanggal 17 Maret 2021.

3. Berikut merupakan rincian pengungkapan lainnya di BPS Kota Bontang selama periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023:

- BPS Kota Bontang tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- BPS Kota Bontang Tidak memiliki rekening bendahara penerimaan;
- Tidak terdapat rincian uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima;
- Tidak terdapat rincian mengenai jalan, irigasi, dan jaringan;
- Tidak terdapat rincian mengenai konstruksi dalam pengerjaan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan yang ditangguhkan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan diterima di muka;
- Tidak terdapat rincian mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
- Tidak memiliki pos luar biasa;
- Tidak terdapat Penyesuaian nilai tahun berjalan;
- Tidak terdapat Koreksi nilai persediaan;
- Tidak terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi;
- Tidak terdapat koreksi atas beban;
- Tidak terdapat koreksi atas pendapatan;
- Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca;
- Tidak terdapat tindak lanjut pemeriksaan BPK.

4. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023, pada Kementerian/Lembaga Badan Pusat Statistik Kota Bontang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (01) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan (03) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp1.262.201.000 dan realisasi sebesar Rp1.260.115.845 (99,83%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Ooutput	Target	Capaian Rincian Output	%
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	21.629.000	21.339.000	98,66	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	16.233.000	16.077.884	99,04	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	23.458.000	23.108.779	98,51	Layanan	1	1	100,00

BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	862.311.000	861.749.182	99,93	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area	19.570.000	19.561.000	99,95	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	319.000.000	318.280.000	99,77	Unit	21	21	100,00

b. Prioritas Nasional III - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp432.878.000 dan realisasi sebesar Rp385.079.350 (88,96%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Ooutput	Target	Capaian Rincian Output	%
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	432.878.000	385.079.350	88,96	Layanan	1	1	100,00

5. Pada Tahun Anggaran 2023 di BPS Kota Bontang terdapat 1 (satu) RO yang memiliki penanda tematik APBN dengan Tema 03 yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG). Pengungkapan ini dirinci sebagai berikut.

a. Anggaran Responsif Gender (ARG)(03)

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 RO yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp3.000.000 dan realisasi sebesar Rp2.993.000 (99,77%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Ooutput	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik	3.000.000	2.993.000	99,77	Layanan	1	1	100,00	Bukan Program Prioritas

6. Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh BPS Kota Bontang dirinci sebagai berikut.

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx / T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	'005	Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei	-	10.110.000	10.106.679	99,97	1 Layanan	1 Layanan	100,00
2	'004	Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik	-	27.050.000	27.017.671	99,88	1 Layanan	1 Layanan	100,00
3	'003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	-	3.000.000	2.992.000	99,73	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
4	956	Layanan BMN	-	7.354.000	7.354.000	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
5	955	Layanan Manajemen Keuangan	-	14.400.000	14.380.000	99,86	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
6	952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	-	22.901.000	22.850.136	99,78	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7	994	Layanan Perkantoran	-	3.338.329.000	3.321.600.548	99,50	2 Layanan	2 Layanan	100,00
8	961	Layanan Reformasi Kinerja	-	2.087.000	2.077.000	99,52	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
9	951	Layanan Sarana Internal	-	334.700.000	334.700.000	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00
10	962	Layanan Umum	-	35.448.000	35.351.235	99,73	1 Layanan	1 Layanan	100,00
11	'004	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	PN 01	319.000.000	318.280.000	99,77	21 Unit	21 Unit	100,00
12	'009	Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	PN 01	23.458.000	23.108.779	98,51	1 Layanan	1 Layanan	100,00
13	'007	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	PN 01	21.629.000	21.339.000	98,66	1 Layanan	1 Layanan	100,00
14	'010	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area	PN 01	19.570.000	19.561.000	99,95	1 Layanan	1 Layanan	100,00
15	'004	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik	T 03	3.000.000	2.993.000	99,77	1 Layanan	1 Layanan	100,00
16	'006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	-	54.067.000	54.021.136	99,92	1 Layanan	1 Layanan	100,00

17	'009	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	PN 03	432.878.000	385.079.350	88,96	1 Layanan	1 Layanan	100,00
18	'008	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	PN 01	16.233.000	16.077.884	99,04	1 Layanan	1 Layanan	100,00
19	'004	Publikasi/Laporan Sakernas	-	159.642.000	159.578.444	99,96	1 Layanan	1 Layanan	100,00
20	'006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	PN 01	862.311.000	861.749.182	99,93	1 Layanan	1 Layanan	100,00
21	'004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	-	14.253.000	14.252.669	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
22	'009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	-	65.036.000	64.611.456	99,35	1 Layanan	1 Layanan	100,00
23	'008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	-	14.044.000	14.044.000	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
24	'006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi	-	81.810.000	81.774.471	99,96	1 Layanan	1 Layanan	100,00
25	'006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	-	450.000	449.439	99,88	1 Layanan	1 Layanan	100,00
26	'004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	-	22.954.000	22.928.909	99,89	1 Layanan	1 Layanan	100,00
27	'007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	-	38.974.000	38.960.384	99,97	1 Layanan	1 Layanan	100,00
28	'005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu	-	6.001.000	5.998.877	99,96	1 Layanan	1 Layanan	100,00
29	'006	Publikasi/Laporan Susenas	-	298.303.000	298.196.092	99,96	1 Layanan	1 Layanan	100,00

7. DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8217-0272-9060-7738 dengan total nilai pagu anggaran Rp 6.840.191.000 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Per 31 Desember 2023, BPS Kota Bontang telah melakukan 12 kali revisi anggaran sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka Automatic Adjustment sesuai surat Pengguna Anggaran no : B-507/01000/PR.440/12/2022.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.792.000	36.792.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	39.552.000	39.552.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	7.941.000	7.941.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	6.096.000	6.096.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	46.776.000	46.776.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	61.171.000	61.171.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	158.923.000	158.923.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	348.805.000	348.805.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	488.075.000	488.075.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	18.397.000	18.397.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	4.540.000	4.540.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	1.801.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.052.000	3.052.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.382.271.000	1.382.271.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.814.958.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	342.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22.593.000	22.593.000	-
Total		6.840.191.000	6.840.191.000	-

b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka Penyesuaian Hal III DIPA.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.792.000	36.792.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	39.552.000	39.552.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	7.941.000	7.941.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	6.096.000	6.096.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	46.776.000	46.776.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	61.171.000	61.171.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	158.923.000	158.923.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	348.805.000	348.805.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	488.075.000	488.075.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	18.397.000	18.397.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	4.540.000	4.540.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	1.801.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.052.000	3.052.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.382.271.000	1.382.271.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.814.958.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	342.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22.593.000	22.593.000	-
Total		6.840.191.000	6.840.191.000	-

- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-235/02100/PR.400/02/2023 dan perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	-	3.000.000	3.000.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.792.000	38.974.000	2.182.000
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	39.552.000	60.067.000	20.515.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	7.941.000	9.810.000	1.869.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	6.096.000	14.253.000	8.157.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	46.776.000	73.036.000	26.260.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	61.171.000	70.810.000	9.639.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	158.923.000	159.642.000	719.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	348.805.000	308.303.000	-40.502.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	488.075.000	465.852.000	-22.223.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	18.397.000	22.954.000	4.557.000
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	4.540.000	6.100.000	1.560.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	1.801.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.052.000	10.844.000	7.792.000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.382.271.000	1.673.349.000	291.078.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.814.958.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	342.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22.593.000	23.043.000	450.000
Total		6.840.191.000	7.155.244.000	315.053.000

- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka ralat rencana penarikan dana Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK serta perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	60.067.000	60.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	9.810.000	9.810.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	73.036.000	73.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70.810.000	70.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	308.303.000	308.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	465.852.000	465.852.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	6.100.000	6.100.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	1.801.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	10.844.000	10.844.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.673.349.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.814.958.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	342.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23.043.000	23.043.000	-
Total		7.155.244.000	7.155.244.000	-

- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka Revisi DIPA antar SATKER sesuai surat kepala BPS Provinsi Kaltim No. B-33/64511/PR.440/05/2023 dan perubahan *Automatic Adjustment* pada Sensus Pertanian 2023 dan Regsosek.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	60.067.000	60.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	9.810.000	9.810.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	73.036.000	73.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70.810.000	70.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	308.303.000	308.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	465.852.000	465.852.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	6.100.000	23.458.000	17.358.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	1.801.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	10.844.000	10.844.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.673.349.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.814.958.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	342.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23.043.000	23.043.000	-
Total		7.155.244.000	7.172.602.000	17.358.000

- f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-981/02100/PR.440/06/2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	60.067.000	54.067.000	-6.000.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	9.810.000	10.110.000	300.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	73.036.000	65.036.000	-8.000.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70.810.000	81.810.000	11.000.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	308.303.000	298.303.000	-10.000.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	465.852.000	432.878.000	-32.974.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	1.801.000	6.001.000	4.200.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	10.844.000	14.044.000	3.200.000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.673.349.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.814.958.000	3.496.283.000	-318.675.000
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	342.000.000	334.700.000	-7.300.000
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23.043.000	39.388.000	16.345.000
Total		7.172.602.000	6.824.698.000	-347.904.000

- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka dalam rangka Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2023 sesuai surat SESTAMA No. B-848/02000/PR.440/07/2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.673.349.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.496.283.000	3.289.439.000	-206.844.000
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.824.698.000	6.617.854.000	-206.844.000

- h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka dalam rangka pemenuhan anggaran ST2023, belanja pegawai, anggaran pembinaan Desa Cantik, dan anggaran kegiatan Sakernas di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur No. B-069/64511/PR.440/09/2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.673.349.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.289.439.000	3.407.499.000	118.060.000
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.617.854.000	6.735.914.000	118.060.000

- i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran ST2023, belanja pegawai, penambahan belanja (53), dan optimalisasi anggaran non operasional belanja barang (52) sesuai Surat Sekretaris Utama BPS RI No. B-1740/02100/PR.440/09/2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	10.165.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.673.349.000	1.318.049.000	-355.300.000
2910.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	319.000.000	319.000.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.407.499.000	3.381.131.000	-26.368.000
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.735.914.000	6.673.246.000	-62.668.000

- j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai *Automatic Adjustment* TA 2023 sesuai Surat Sekretaris Utama BPS RI no B-1179/02000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	10.165.000	450.000	-9.715.000
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	1.318.049.000	903.510.000	-414.539.000
2910.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	319.000.000	319.000.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.381.131.000	3.381.131.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.673.246.000	6.248.992.000	-424.254.000

k. Revisi ke-11 dilakukan dalam rangka revisi pemenuhan belanja gaji pegawai 2023.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	450.000	450.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	903.510.000	903.510.000	-
2910.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	319.000.000	319.000.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.381.131.000	3.381.131.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.248.992.000	6.248.992.000	-

1. Revisi ke-12 dilakukan melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka update data akhir revisi POK.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DB	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	27.050.000	27.050.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	38.974.000	38.974.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	16.233.000	16.233.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	54.067.000	54.067.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	10.110.000	10.110.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	14.253.000	14.253.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	65.036.000	65.036.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	81.810.000	81.810.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	159.642.000	159.642.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	298.303.000	298.303.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	450.000	450.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	432.878.000	432.878.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	22.954.000	22.954.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	23.458.000	23.458.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	6.001.000	6.001.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	14.044.000	14.044.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	903.510.000	903.510.000	-
2910.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	319.000.000	319.000.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.381.131.000	3.381.131.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	334.700.000	334.700.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39.388.000	39.388.000	-
Total		6.248.992.000	6.248.992.000	-